

Terkait Nota Keuangan Ranperda APBD Kota Solok 2024, Fraksi Golkar Ingatkan Pemerintah Tidak Zalim dan Berprikemanusiaan

JIS Sumbar - KOTASOLOK.INDONESIASATU.ID

Nov 5, 2023 - 19:33



SOLOK KOTA - Menyikapi Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Solok tahun anggaran 2024 dan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Fraksi Golkar DPRD Kota Solok

menyinggung terkait penurunan APBD sementara terjadi peningkatan pengeluaran dengan dasar pidato peresiden yang belum ditindak lanjuti dengan aturan yang jelas, sehingga diperkirakan belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan gedung, jalan, irigasi yang mempunyai nilai mamfaat lebih satu tahun yang sangat diharapkan oleh masyarakat makin berkurang.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar Nasril In, SH, Dt. Malintang Sutan dalam pandangan umum Fraksi Golkar terhadap Nota keuangan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Solok, Sabtu, 4 November 2023.

Disebutkan Ketua Fraksi Golkar, bahwa menurut nota yang disampaikan Wali Kota sebelumnya, hanya 10,91 persen dari seluruh APBD yang direncanakan untuk tahun 2024. Untuk itu Fraksi Golkar berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Walikota untuk sungguh sungguh memperhatikan hal tersebut.

“Kami berharap saudara Walikota mengambil sikap karena kami berfikir, sangat zalim rasanya kita ketika masyarakat membutuhkan jalan, irigasi dan jalan-jalan untuk diperbaiki malah dibiarkan walaupun sebahagian kecil dapat teratasi. Ini tantangan juga bagi kita semua, masyarakat kita sudah sangat pintar dan jeli. Mereka sangat merasakan minimnya pembangunan empat tahun terakhir ini,” sebut Nasril.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan terhadap perilaku menyimpang seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang menurutnya merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ajaran agama.

“Hal tersebut menurut kami sesuatu yang dimurkai Allah SWT, dan mendekatkan negeri kepada kebinasaan,” imbuhnya.

Untuk itu Fraksi Golkar berharap Pemerintah Daerah Kota Solok memaksimalkan penyediaan anggaran guna penyuluhan, pencegahan, penanganan serta pemulihan dan menjadi program yang terpadu bagi seluruh OPD dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, terutama pihak-pihak yang berkopoten agar terhindar dari penyakit psikologis maupun penyakit secara fisik ‘HIV AIDS’.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya dan sangat vital, kata Nasril, kondisi saat ini di seluruh tingkat kelurahan mempekerjakan para kader dalam menghimpun data-data masyarakat dari berbagai sektor Kota Solo, dengan menghargai jasa mereka hanya dengan uang sejumlah Rp.75.000 per bulan.

Mirisnya lagi, dilakukan pemotongan ketika mereka terlambat saat dibutuhkan hadir dalam kegiatan-kegiatan rapat.

“Apakah ini layak yang mereka terima sementara kerja mereka melakukan pendataan-pendataan yang berguna untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Kami berharap saudara Walikota untuk menyikapi semua ini sehingga kita semua tidak dipandang sebagai orang yang tidak berprikemanusiaan,” pungkas Nasril In Dt. Malintang Sutan. (Amel)